

**KEBIJAKAN PARIWISATA DALAM MENDUKUNG  
PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Nia Ramilyanti  
151010003**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2019**

**KEBIJAKAN PARIWISATA DALAM MENDUKUNG  
PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:  
Nia Ramilyanti  
151010003**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2019**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 05 September 2019

Yang membuat pernyataan



Nia Ramilyanti

151010003

**KEBIJAKAN PARIWISATA DALAM MENDUKUNG  
PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:  
Nia Ramilyanti  
151010003**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 05 September 2019**



**Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si**  
Pembimbing

## ABSTRAK

Kontribusi industri pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan suatu daerah, tidak terlepas dari kenyataan bahwa pariwisata merupakan sektor jasa yang inheren dengan kehidupan masyarakat modern. Semakin tinggi pendidikan dan ekonomi seseorang atau masyarakat, maka kebutuhan terhadap pariwisata akan semakin besar pula. Pariwisata mempunyai kekuatan sinergetik karena keterkaitan yang erat sekali dengan berbagai bidang dan sektor lainnya. Pariwisata akan berkembang seiring dengan perkembangan transportasi, telekomunikasi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Adanya fluktuasi pariwisata di Kota Batam, merupakan salah satu alasan peneliti melakukan penelitian. Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Batam. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan fakta-fakta sosial yang cukup menarik: 1) Kebijakan pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan Di Kota Batam yang direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dengan menerapkan konsep 3A dalam mengembangkan daerah sebagai destinasi wisata, yaitu atraksi, aksesibilitas dan amenitas. 2) Atraksi destinasi di Kota Batam yang sering menjadi tempat berkunjung para wisata mancanegara (wisman) didominasi oleh atraksi buatan, hal ini dikarenakan tempat-tempat tersebut lebih mudah dijangkau dari pusat Kota Batam. Adanya kerjasama dalam mengembangkan pariwisata antara pemerintah Kota Batam khususnya disbudpar dengan swasta (masyarakat). 3) Kebijakan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yaitu terlihat dari perubahan ruas jalan di Batam yang signifikan. Disamping pembangunan ruas jalan yang lebar, Batam saat ini sudah memiliki Aksesibilitas berupa Jalan layang Simpang Jam atau yang biasa disebut Flyover Simpang Jam. Dan 4) amenitas destinasi yang dimiliki oleh Batam yang menunjang perjalanan wisman ke Kota Batam yakni ada angkutan darat yang bisa mengantar wisman ke tujuannya.

Kata Kunci : Kebijakan Disbudpar; Pariwisata; Wisatawan; Kota Batam.

## **ABSTRACT**

*The contribution of the tourism industry in the development and development of an area, can not be separated from the fact that tourism is a service sector that is inherent in the life of modern society. The higher education and economy of a person or society, the need for tourism will be even greater. Tourism has a synergetic power due to its close links with various fields and other sectors. Tourism will develop along with the development of transportation, telecommunications, human resources, the environment and so forth. The existence of fluctuations in tourism in the city of Batam, is one of the reasons researchers conducted research. The study was conducted to describe and analyze the role of the Culture and Tourism Office in increasing tourist arrivals in Batam City. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this study found interesting social facts: 1) Tourism policies to support increased tourist visits in Batam City planned by the Batam City Culture and Tourism Office by applying the 3A concept in developing regions as tourist destinations, namely attractions, accessibility and amenities . 2) Attraction destinations in Batam City which are often places to visit foreign tourists (tourists) are dominated by artificial attractions, this is because these places are more easily accessible from the center of Batam City. There is cooperation in developing tourism between the Batam City government, especially the Disbudpar and the private sector (community). 3) Tourism policy by the Batam City Tourism Culture program is seen from the significant changes in the roads in Batam. Besides the construction of wide roads, Batam currently has Accessibility in the form of the Simpang Jam overpass or commonly called the Simpang Jam Flyover. And 4) destination amenities owned by Batam that support the journey of tourists to the city of Batam, namely there is land transportation that can take tourists to their destinations.*

*Keywords: Disbudpar Policy; Tourism; Traveler; Batam city*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ajuh dari sempurna, karena itu kritik dan senantiasa penulis terima dengan senang hati dengan segala keterbatasan, penuliis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.S.I Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si Selaku Pembimbing Skripsi Dan Pembimbing Akademik Pada Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis menuntut Ilmu di Universitas Putera Batam.
4. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.

5. Bapak/Ibu Dosen pengajar Di Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman serta motivasinya.
6. Bapak Drs. Ardiwinata Selaku Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Batam Telah Mengizinkan Saya Untuk Melakukan Penelitian Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Batam.
7. Ibu Nurlela, SE Selaku KA. Seksi Objek & Daya Tarik Wisata.
8. Ibu Chairani, AMD Selaku Staf Bagian Umum & Kepegawaian.
9. Kedua orang tua Bapak Refolita dan Ibu Mil Irdawati, Kedua Adik Tia Revita dan Novianti, Suami Angga Purnomo dan Anak Azkiya beserta keluarga besar yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta mendoakan agar tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan studi.
10. Teman-teman Prodi Administrasi Negara angkatan 2015 khususnya Firman Alhaadi, Agung, Farhana dan teman-teman seperjuangan.
11. Serta semua pihak yang memberikan masukan, kritikan dan bantuan yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan dan memberikan hidayah dan karunia-Nya, Amin.

Batam, 09 Agustus 2019

Nia Ramilyanti

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Judul.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ixi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kebijakan Publik.....	10
2.2 Kebijakan Pariwisata .....	12
2.3 Unsur-unsur Kebijakan .....	13
2.4 Implementasi Kebijakan Pariwisata .....	15
2.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	22
2.6 Wisata .....	26
2.7 Minat Kunjungan .....	27
2.8 Penelitian Terdahulu.....	28
2.9 Kerangka Berpikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

3.1	Jenis Penelitian.....	33
3.2	Fokus Penelitian.....	33
3.3	Sumber Data .....	34
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5	Metode Analisis Data .....	37
3.6	Keabsahan Data.....	39
3.7	Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	39
a.	Lokasi Penelitian.....	39
b.	Jadwal Penelitian .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Hasil Penelitian .....	41
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	41
4.1.2	Fungsi dan Struktur Organisasi .....	42
4.1.3	Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam .....	52
4.1.4	Objek Wisata.....	53
4.1.5	Kebijakan Pariwisata Dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Batam .....	64
4.1.6	Faktor Penghambat Dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Batam .....	75
4.1.7	Faktor Pendukung Dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Batam .....	78
4.2	Pembahasan .....	80
4.2.1	Kebijakan Pariwisata Dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Batam .....	82
4.2.2	Faktor Penghambat Dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Batam .....	85
4.2.3	Faktor Pendukung Dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Batam .....	86
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	SIMPULAN.....	88
5.2	SARAN .....	90
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	32
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	39
Gambar 4.1 Wisata Pantai Melur Kota Batam.....	67
Gambar 4.2 Wisata Belanja Kota Batam.....	69
Gambar 4.3 Aksesibilitas Jalan Kota Batam.....	71
Gambar 4.4 Amenitas PAntai Vio-Vio Kota Batam .....	74

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Jiwa) 2010-2018.....	6
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	36
Tabel 3.2 Waktu Penelitian 2018-2019 .....	40

## DAFTAR SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
BPSN	: Badan Pusat Statistik Nasional
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Wisman	: Wisatawan Mancanegara
BKB	: Batas Kontrol Bawah
SD	: Standar Deviasi

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA  
LAMPIRAN II SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
LAMPIRAN III DOKUMENTASI  
LAMPIRAN IV DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia memiliki salah satu sektor yang sangat besar kontribusinya dalam perekonomian yaitu sektor pariwisata. Sektor pariwisata berpotensi menjadi penyumbang besar dalam pembangunan nasional dengan berbagai peluang dalam penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan penghasilan, pengembangan wawasan dan budaya, mengoptimalkan pelestarian objek budaya bangsa dan objek keindahan panorama alamnya.

Kontribusi industri pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan suatu daerah, tidak terlepas dari kenyataan bahwa pariwisata merupakan sektor jasa yang *inheren* dengan kehidupan masyarakat modern. Semakin tinggi pendidikan dan ekonomi seseorang atau masyarakat, maka kebutuhan terhadap pariwisata akan semakin besar pula. Pariwisata mempunyai kekuatan sinergetik karena keterkaitan yang erat sekali dengan berbagai bidang dan sektor lainnya. Pariwisata akan berkembang seiring dengan perkembangan transportasi, telekomunikasi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Tumpuan pariwisata sebagai kekuatan daya saing terletak pada sumber daya yang terolah dengan baik

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor perekonomian yang terus berkembang pesat. Sektor pariwisata menjadi sektor yang pertumbuhannya tetap

terjaga. Pada tahun 2017 sumbangan devisa Negara dari sektor pariwisata melesat sebesar 16,8 miliar dollar AS, yang pada tahun sebelumnya hanya menyumbang 13,5 miliar dollar AS. Angka ini diprediksikan akan terus meningkat 20 persen menjadi 20 miliar AS pada tahun 2018 dan sektor pariwisata di Indonesia diproyeksikan mampu menyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar 15 persen ditahun 2019 (Cahyu, 2018).

Sektor pariwisata mampu mendorong perkembangan industri kreatif dengan beberapa subsektor yaitu periklanan, pasar barang seni, kerajinan, fesyen, seni pertunjukan, musik dan lain-lainnya. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta negara akan mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.

Di era otonomi daerah yang kini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunannya dan penentuan sektor-sektor prioritas daerah. Dalam pembagian kewenangan/urusan antartingkat pemerintahan yang diatur dalam beberapa peraturan seperti dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 4 Tentang Kepariwisataaan dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air,

memperkokuh jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antarbangsa.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 33 tahun 2009 Tentang Pedoman pengembangan ekowisata di daerah, yang dimaksud dengan ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Saat ini sektor pariwisata di Indonesia belum berjalan secara optimal padahal aspek ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan devisa negara, pendapatan masyarakat, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa urusan kebudayaan dan pariwisata merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antartingkat pemerintahan. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antartingkat pemerintahan. Berdasarkan pembagian urusan tersebut, sektor pariwisata merupakan urusan pilihan pemerintahan daerah.

Untuk mendanai kewenangan tersebut, diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan kewenangan penuh daerah. Terkait hal tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata terkait erat dengan pemungutan

pajak dan retribusi daerah, terutama pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Disaat terjadi kecenderungan perubahan selera wisatawan dunia (*consumer behaviour pattern*) dari wisata konvensional ke jenis wisata yang lebih beragam, seperti wisata kreasi budaya (*culture*), peninggalan sejarah (*heritage*), dan ekowisata (*nature*), jumlah perjalanan wisata dunia pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 1,6 miliar orang (Harun, 2008). Hal ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menarik wisatawan mancanegara. Selain itu, perkembangan jumlah wisatawan dari luar daerah Batam pun cukup meningkat signifikan sebagai akibat peningkatan jumlah pendapatan masyarakat di kalangan menengah, juga merupakan peluang pasar domestik yang cukup besar.

Salah satu daerah yang berpotensi dalam sektor pariwisata adalah Kota Batam. Kota Batam merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang mana letaknya sangat strategis karena berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Batam per 2016, jumlah penduduk Batam mencapai 1.236.399 jiwa. Dalam penggerak perekonomian Kota Batam tidak hanya dari sektor industri pengolahan, melainkan juga dari sektor pariwisata. Batam yang dikaruniai keindahan alam serta keunikan budaya masyarakat lokal yaitu Melayu dengan beragam kesenian tradisionalnya merupakan potensi pariwisata yang sangat besar untuk dikembangkan.

Pada tahun 2010, pemerintah Kota Batam menggelar tahun kunjungan wisata bertajuk *Visit Batam 2010 – Experience it*. Didukung oleh fasilitas hotel dan resort berstandar internasional serta aneka kegiatan wisata yang disusun dalam Kalender Kegiatan Kepariwisata Kota Batam, yang mana diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara saat berkunjung ke Kota Batam.

Di bidang pariwisata, Kota Batam telah menunjukkan eksistensinya dengan berada di lima besar jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut pintu masuk utama tahun 2012 dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 1.219.608 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 5,51 % setelah Bali dan Jakarta (Badan Pusat Statistik Nasional, 2012). Hal ini diperkuat dengan Kepres No. 15 tahun 1983 bahwa Kota Batam sebagai pintu masuk utama wisatawan mancanegara.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging menilai, pemerintah daerah sudah seharusnya memikirkan bagaimana wisman menjadi betah di Batam. Sehingga rata-rata lama menginap wisman pun bisa lebih lama. Bila dilihat rata-rata saat ini bisa saja karena tidak wisata yang bisa dijual di Batam, sementara event bertaraf nasional pun dinilai sangat minim.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batam melalui kebijakan pariwisatanya mencoba berbagai upaya agar jumlah kunjungan wisatawan meningkatkan. Berikut data banyaknya wisatawan mancanegara yang datang melalui pintu masuk Kota Batam per 2010-2017.

**Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Mancanegara (jiwa) yang Datang melalui Pintu Masuk Kota Batam dan Pertumbuhannya (persen), 2010-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Banyaknya Wisman</b>	<b>Pertumbuhan Wisman</b>
<b>2010</b>	1,007,446	
<b>2011</b>	1,161,581	15.3%
<b>2012</b>	1,219,608	5.0%
<b>2013</b>	1,336,430	9.6%
<b>2014</b>	1,454,110	8.8%
<b>2015</b>	1,545,818	6.3%
<b>2016</b>	1,432,472	-7.3%
<b>2017</b>	1,504,275	5.01%
<b>2018</b>	1,887,244	20.29%

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Batam, Nov 2018

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Batam pada tanggal tahun 2018, secara umum jumlah kunjungan wisatawan di Kota Batam, terlihat adanya kestabilan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2010 ke tahun 2015. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan jumlah kunjungan di Kota Batam adalah 1.432.472 orang. Kemudian pada tahun 2017 - 2018 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 1.887.244 orang.

Bila dilihat dari data statistik pariwisata diatas kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) terjadi penurunan pada tahun 2016, menurut BPS struktur sumbangannya tak berbeda banyak dengan bulan sebelumnya, yakni masih didominasi wisatawan mancanegara Singapura dan wisatawan mancanegara kebangsaan China dan faktor lain yang menjadi persoalan adalah akses transportasi menuju obyek wisata di Kota Batam masih kurang mendukung. Kurang mendukungnya akses transportasi ini disebabkan oleh kurangnya petunjuk jalan menuju obyek wisata. Faktor selanjutnya yang menjadi persoalan adalah kurangnya fasilitas pendukung yang dimiliki di obyek wisata. Misalnya,

kurangnya penjaga keamanan di beberapa obyek wisata, kurangnya rumah makan dan kamar mandi atau toilet umum di sekitar obyek wisata.

Penulis tertarik mengangkat penelitian ini karena Kota Batam merupakan daerah yang baru saja mengembangkan sektor pariwisatanya, sehingga diharapkan bisa memunculkan model kebijakan pariwisata yang ideal untuk memberi nilai tambah optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada pembahasan aspek kebijakan pariwisata yang lebih makro.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pariwisata, pada penelitian ini peneliti membagi menjadi 3 kelompok penelitian yaitu *pertama*, penelitian yang membahas mengenai Peran Lembaga Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Suryaningsih, Oktavia, 2016) dan Peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batam dalam upaya agar jumlah kunjungan wisatawan meningkat, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Abdul Muis, 2016). *Kedua* penelitian yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kota Batam dan Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Widyasti, 2013), (Eri Irawan, 2015), dan (Firdaus, 2014). *Ketiga*, penelitian yang membahas mengenai kebijakan pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Setyorini, Timang, 2014), dan (Novita, Rina, 2013). Hingga saat ini banyak penelitian mengenai Pariwisata seperti di atas, namun penelitian ini termasuk pada kategori yang juga membahas

mengenai peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batam dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Penelitian sebelumnya yang dimaksud dilakukan oleh (Hidayat, 2011), dan (Sabon, 2018). Namun, penelitian tersebut belum terlalu dalam membahas aspek indikator dari kebijakan pariwisata yang kemudian dalam penerapannya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, melainkan mengenai kinerja dari kebijakan tersebut.

Penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya, dikarenakan sedikitnya penelitian mengenai kebijakan pariwisata di Kota Batam. Pentingnya penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Pariwisata di Kota Batam. 2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batam dalam upaya meningkatkan wisatawan di Kota Batam. 3. Memberikan alternatif solusi yang diperlukan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batam untuk meningkatkan wisatawan di Kota Batam.

Berdasarkan dari data diatas peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana peran kebijakan pariwisata di Kota Batam untuk meningkatkan kunjungan di kota Batam dengan judul penelitian **“Kebijakan Pariwisata Dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Di Kota Batam”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pariwisata dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batam?

2. Apa saja faktor penghambat kebijakan pariwisata dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batam?
3. Apa saja faktor pendukung kebijakan pariwisata dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batam?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami kebijakan pariwisata dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batam.
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan faktor penghambat dari kebijakan pariwisata dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batam.
3. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan faktor pendukung dari kebijakan pariwisata dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batam.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan pemahaman, literatur, dan masukan bagi penelitian lain yang tertarik untuk mengkaji kebijakan pemerintah kota dalam pengembangan pariwisata.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah kota Batam dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Batam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

Dalam pengembangan sektor-sektor usaha dalam suatu daerah termasuk di dalamnya sektor pariwisata diperlukan adanya suatu kebijakan untuk mengatur berjalannya sektor tersebut. Kebijakan ini adalah kebijakan yang menyangkut tentang masyarakat, budaya serta ekonomi.

Kebijakan adalah suatu keputusan politis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki suatu daerah. Berikut adalah beberapa penjelasan kebijakan publik dari para ahli. Menurut Winarno, 2012, secara umum, istilah kebijakan (*policy*) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Riko Riyanda, 2017, Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan secara umum, pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah. Menurut Syafiie, 2016 dalam Tahir, 2014, Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi serta pemuka terjadinya

kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Menurut James E. Anderson, 1984, kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Menurut James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan,
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pejabat pemerintah,
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,
4. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu,
5. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Dari elemen tersebut, kita dapat memberi kesimpulan atau titik tekan pada (tindakan pemerintah), dilaksanakan secara nyata, maksud dan tujuan tertentu, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik selalu merepresentasikan tindakan pemerintah secara nyata dengan maksud untuk

kepentingan masyarakat. Kebijakan publik mestilah berkaitan dengan persoalan bersama (*collective problem*) yang karena alasan politis, teknis, administratif, dan finansial membutuhkan intervensi pemerintah dan tidak bisa diselesaikan secara individual. Dalam konteks inilah pariwisata termasuk problem publik yang membuat negara harus hadir untuk mengaturnya.

## **2.2 Kebijakan Pariwisata**

Definisi kebijakan pariwisata yang dinukil dari beberapa ahli yakni Menurut Goeldner dan Ritchie, 2006, kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi.

Menurut Biederman, 2007, kebijakan pariwisata sebuah adalah prinsip yang harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.

Menurut Edgell, dkk, 2008, kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata di masa yang akan datang.

Pemasaran, pengembangan produk, dan pelayanan *hospitality* memegang peranan penting dalam kebijakan kepariwisataan. Kebijakan kepariwisataan bersifat dinamis dan fleksible dalam melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap perkembangan yang terjadi. Kebijakan kepariwisataan terkait erat dengan perencanaan kepariwisataan. Perencanaan kepariwisataan memperkuat kedudukan kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan.

Edgell, dkk (2008) mengemukakan bahwa model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan, sasaran, strategi, dan taktik dalam pengembangan pariwisata. Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata dalam era globalisasi dan otonomi daerah tidak dapat lagi menggantungkan pada kebijakan dan peran pemerintah pusat saja, tetapi diperlukan peran aktif pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas pengembangan atraksi atau kombinasi atraksi budaya di daerah berdasarkan potensi masing-masing daerah. Hal ini memerlukan kerjasama yang optimal dengan sektor swasta, lembaga/institusi pemerintah dan masyarakat.

### **2.3 Unsur-Unsur Kebijakan**

Dilihat dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan menurut Abidin (2004:45) yaitu;

#### **1. Tujuan kebijakan**

Bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, demikian tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Tidak demikian semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu. Perbedaan terletak tidak sekedar pada jangka waktu mencapai tujuan dimaksud, tetapi juga ada posisi, gambaran, orientasi, dan dukungannya. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria, yaitu: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, jelas dan berorientasi ke depan.

## **2. Masalah**

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan kalau pemecahannya dilakukan bagi masalah yang tidak benar.

## **3. Tuntutan (*demand*)**

Partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. Partisipasi itu berbentuk dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal. Tergantung pada pentingnya dari tuntutan tersebut.

## **4. Dampak**

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan.

## **5. Sasaran atau alat kebijakan**

### **6.**

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri.

Dari lima unsur kebijakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai dan sebagai pemecahan suatu masalah untuk memenuhi tuntutan dengan suatu alat kebijakan.

## **2.4 Implementasi Kebijakan Pariwisata**

Kebijakan sektor pariwisata merupakan kebijakan pembangunan yang tidak dapat dilepaskan dari isu kelestarian lingkungan hidup, pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal, dan otonomi daerah. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata didasarkan dari konsep pariwisata berkelanjutan. Pada dasarnya pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memuaskan kebutuhan wisatawan dan kawasan wisata pada saat ini serta melindungi sumber daya dan meningkatkan peluang di masa depan. Sumber daya alam dan sumber daya budaya yang dimanfaatkan .untuk pariwisata pada saat ini tetap dilestarikan untuk generasi mendatang.

Dalam perspektif demikian maka pengembangan pariwisata harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan, lebih spesifik lagi pengembangan pariwisata dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal

diimplementasikan dengan model partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk strategi perencanaan pariwisata.

Menurut Muljadi (2012:72-78) Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan Indonesia dan berdasarkan Rencana Repelita VII Pariwisata, diperlukan suatu strategi melalui kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara terus menerus. Kebijakan ini ditetapkan sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

### **1. Menjadikan Pariwisata sebagai Penghasil Devisa Utama**

Upaya memperkokoh perekonomian perlu peningkatan penerimaan devisa, di mana salah satu sektor potensialnya adalah sektor pariwisata. Untuk itu, kebijaksanaan yang ditempuh adalah:

- a. Menggencarkan pemasaran dan promosi dengan memberikan peran yang lebih dominan bagi usaha pariwisata.
- b. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi berbagai sektor terkait, baik ditingkat pusat maupun daerah dalam setiap kegiatan pemasaran dan promosi baik di dalam maupun luar negeri.
- c. Mengharap lebih intensif pasar Asia Pasifik sehingga akan semakin meningkatkan pangsa pasar.
- d. Menggarap sigmen pasar yang berpotensi pembelanjaan tinggi dengan didukung peningkatan mutu pelayanan dan diversifikasi produk.
- e. Memberikan kemudahan wisatawan untuk mengadakan perjalanan.

- f. Meningkatkan promosi terpadu dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral.
- g. Meningkatkan citra pariwisata melalui keikutsertaan dalam event-event pariwisata internasional.
- h. Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan promosi melalui penyajian data dan informasi yang akurat.

## **2. Menjadikan Pariwisata Nusantara sebagai Pendorong Pembangunan**

Sebagai sektor pembangunan yang multidimensional, pengembangan pariwisata nusantara yang mempunyai potensi dampak pengganda yang relatif besar, sebagai pendorong pembangunan. Untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah:

- a. Meningkatkan sadar wisata masyarakat melalui pemasyarakatan Sapta Pesona.
- b. Mengembangkan promosi Dalam Negeri untuk menjadikan Nusantara sebagai daerah tujuan wisata bagi penduduk Indonesia.
- c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan nasional.
- d. Penyebarluaskan informasi objek dan daya tarik wisata serta sarana pendukungnya kepada masyarakat.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana untuk sigmen pasar wisnus (wisata remaja, lansia, dan penyandang cacat).

## **3. Meningkatkan Ketangguhan Kepariwisata Nasional**

Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan, maka produk wisata harus mampu meningkatkan ketangguhan di tengah-tengah persaingan yang cukup ketat. Untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah:

- a. Menyusun perencanaan pengembangan pariwisata nasional untuk dijabarkan ke tingkat daerah dengan memperhatikan pola dasar pengembangan daerah, rencana Tata Ruang Daerah dan standardisasi mutu produk.
- b. Penyesuaian pembangunan daerah tujuan wisata dengan potensi masing-masing, serta mempertimbangkan sasaran pasar yang akan diraih dengan mempertimbangkan tahap perkembangannya.
- c. Pengembangan produk wisata di luar Jawa dan Bali dengan pemantapan dan peningkatan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu, Kawasan Andalan Prioritas, dan kawasan tertentu lainnya dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan.
- d. Pengembangan dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus sebagai komponen utama untuk meningkatkan produk wisata yang berkualitas.
- e. Pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata dan pengusahaan jasa pariwisata seperti Biro Jasa Wisata (BPW), Pramuwisata, dan usaha jasa lainnya serta sistem pendukungnya.

- f. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata dan pengusahaan sarana pariwisata (akomodasi, kawasan pariwisata, wisata tirta, restoran, angkutan wisata, serta sistem pendukungnya).
- g. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- h. Meningkatkan dan memperluas aksesibilitas guna mendukung pengembangan pariwisata.
- i. Meningkatkan mutu pelayanan informasi kepariwisataan.
- j. Pengembangan sistem informasi pariwisata melalui penyediaan pusat data yang handal.
- k. Meningkatkan kualitas produk pariwisata sebagai antisipasi terhadap meningkatnya tuntutan wisatawan.
- l. Peningkatan penggunaan IPTEK guna mendukung optimalisasi pengembangan pariwisata.

#### **4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisata**

Sebagai penyelenggara kegiatan kepariwisataan, peranan sumber daya manusia sangat penting. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, maka kegiatan-kegiatan kepariwisataan dapat menghasilkan pelayanan yang profesional. Untuk itu perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan lembaga pendidikan dan latihan
- b. Guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan secara profesional di bidang kepariwisataan, perlu

dikembangkan model pendidikan dan latihan dengan memberikan fasilitas fisik dan non-fisik dan memanfaatkan iptek modern.

- c. Memperbanyak jumlah pemandu wisata dan penyedia profesional
- d. Pelayanan jasa kepariwisataan juga bertumpu pada profesionalnya pemandu wisata dan penyedia. Peningkatan kemampuan profesional ini mencakup penguasaan dalam memahami dan menggunakan bahasa sehingga perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan di bidang kepariwisataan.
- e. Mengembangkan kerja sama internasional
- f. Kerja sama dalam memberikan pendidikan dan latihan secara internasional, dapat dimulai dengan kerja sama antara negara-negara ASEAN. Hal ini dimaksudkan meningkatkan profesionalnya pemandu dan penyedia wisata, dengan cara merasakan secara langsung pemberian layanan kepariwisataan.

##### **5. Peningkatan Kemitraan Masyarakat, Swasta, dan Media Massa**

Keberhasilan Pembangunan Kepariwisata Nasional merupakan hasil kerja dan instansi pemerintah pusat dan daerah serta instansi swasta, dengan dukungan masyarakat dan media massa. Oleh karena itu, guna mencapai sasaran Pembangunan Kepariwisata Nasional, perlu ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Peningkatan pembinaan media massa
- b. Upaya menyebarluaskan obyek dan daya tarik wisata perlu terus ditingkatkan dengan mengajak serta keterlibatan media massa dalam

pemberitaan secara nasional dan internasional. Oleh karena itu, penyampaian data dan informasi mengenai pembangunan kepariwisataan nasional perlu lebih ditingkatkan melalui berbagai forum dan kesempatan, dan dilakukan pembinaan terhadap wartawannya.

- c. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan
- d. Penyertaan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan dapat ditempuh melalui pembinaan organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, seperti upacara-upacara adat setempat.
- e. Peningkatan pembinaan unit ekonomi setempat
- f. Penyerataan lembaga-lembaga ekonomi daerah, seperti Koperasi Unit Usaha Cindramata, dan unit usaha lainnya sangat diperlukan untuk lebih memperbanyak akses ekonomi kepariwisataan. Penyerataan ini dilakukan secara bersama-sama dengan upaya pembinaan, agar penyelenggaraan kewirausahaan ini mengikuti selera pasar bagi wisatawan mancanegara dan nusantara.
- g. Mendorong peran serta organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan pemahaman terhadap pembangunan kepariwisataan.

## **6. Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektoral**

Pembangunan sektor pariwisata menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga keterpaduan pembangunan pariwisata memerlukan

peningkatan kerja sama lintas sektoral, sehingga perlu ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Memantapkan peraturan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- b. Menanamkan pengertian yang sama tentang pentingnya sektor pariwisata kepada lembaga-lembaga terkait, baik di pusat maupun daerah.
- c. Meningkatkan kerja sama antar lembaga dengan memfungsikan lembaga-lembaga koordinasi yang ada.
- d. Meningkatkan keterpaduan pembinaan unit-unit usaha yang terkait dengan bidang kepariwisataan.
- e. Pemantapan keterpaduan pengembangan daerah tujuan wisata yang didukung oleh pengembangan jaringan perhubungan.
- f. Penyusunan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu serta pemantapan konsolidasi antar sektor terkait.

Dari beberapa kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti melihat kebijakan tersebut dapat menjadi acuan untuk kebijakan kepariwisataan di Kota Batam.

## **2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Dalam proses implementasi kebijakan ini terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Maka penelitian ini mengkalaborasi model implementasi kebijakan Edward yang bisa mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tidak ada faktor tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu jenis dengan jenis yang lain, dan bagaimana hal ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, George C. Edward III mulai dengan mengajukan pertanyaan, prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal.

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan keempat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat penting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah;

1. Komunikasi.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting karena stakeholders harus mengetahui apa yang akan dikerjakan. Hal ini berkaitan dengan mentransmisikan informasi tentang proses implementasi dengan baik kepada target groups dengan kejelasan dan konsistensi stakeholders dalam hasil proses informasi tentang implementasi kebijakan.

- a. Transmisi

Transmisi adalah faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunitas kebijakan. Sebelum pemerintah dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan yang telah dibuat dan suatu perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan. Hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah kebijakan. Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah

yang dikeluarkan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Ketiga, pelaksana mempunyai prasangka buruk terhadap persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, karena komunikasi adalah penerusan pesan kebijakan antara instansi terkait dan para implementator, yang mana pesan tersebut bisa disimpangkan dan disebarluaskan secara sengaja atau tidak. Lebih daripada itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap kebijakan yang akan disampaikan, maka akan memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para implementator akan menghadapi kesulitan yang besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

2. Sumber-Sumber

Dalam menyelesaikan permasalahan ini tentunya diperlukan keterlibatan beberapa instansi dalam implementasi kebijakan, hal ini dapat menimbulkan masalah apabila tidak diikuti dengan tindakan-tindakan yang bisa menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan memang mengarah pada tujuan yang sama. Tindakan komunikasi bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dengan dilibatkannya berbagai pihak berkepentingan adalah koordinasi. Maka yang dimaksud sumber-sumber disini adalah sumber daya yang meliputi, Staf administratif yang cukup (jumlah dan kopentensinya), informasi yang dibutuhkan guna

pengambilan keputusan, kewenangan atau authority dalam melaksanakan tanggung jawab, fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

### 3. Disposisi

Para pelaksana mempunyai keleluasaan yang besar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Sikap atau watak para pelaksana merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijaksanaan. Apabila pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif. Para pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak pula hanya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Tetapi para pelaksana harus mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah kebijaksanaan. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam pengimplementasian kebijakan banyak menemui hambatan karena adanya konspirasi kebijakan yang ada. Saling memanfaatkan dan tidak mau merasa dirugikan dengan kebijakan yang telah diregulasikan.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Menurut Edward salah satu dari aspekpek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya adalah Standart Operating Procedures (SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari

para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan dan sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edward, selain SOP ada karakteristik utama dari birokrasi yaitu fragmentasi, dimana berasal dari tekanan-tekanan diluar unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

## **2.6 Wisata**

Wisata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang – senang, dan sebagainya. Pengertian kepariwisataan yaitu:

1. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisata juga dapat diartikan sebagai piknik.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha (Irawan, Koko, 2010).

Parameter pariwisata yang baik menurut Yoeti (2002) untuk menjadi tempat wisata yang baik hingga tercapainya industri wisata tergantung pada tiga aspek yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*). Dari teori-teori yang telah dijelaskan dapat disimpulkan secara singkat bahwa, pembangunan dibidang pariwisata merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata suatu daerah dalam bentuk keunikan dan kekhasan alam dan budayan melalui suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dan rasional segenap kegiatan atau aktivitas kepariwisataan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengalokasikan keseluruhan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Peneliti menggunakan tiga aspek yang disebutkan diatas dikarenakan indikator tersebut sesuai dan relevan digunakan untuk penelitian ini.

## **2.7 Minat Kunjungan**

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2010: 180). Bila mereka

melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan kemudian mereka berminat dan mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan berkurang maka minat pun ikut berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (dalam jurnal Universitas Brawijaya Malang. Vol.28 No.1, 2015) mengatakan bahwa Minat berkunjung pada dasarnya adalah dorongan dari dalam diri konsumen berupa keinginan untuk mengunjungi suatu tempat atau wilayah yang menarik perhatian seseorang tersebut.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan jika mereka bebas memilih.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Yulia Widarti, 2016) International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 6, No. 7, July 2016. DOI: 10.7763/IJSSH.2016.V6.709. Dengan judul penelitian “*Local Government Attitudes toward Sustainable Tourism Development (Case of Bandung City, Indonesia)*”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sebagai dasar pemerintah daerah di Indonesia Indonesia dalam menyusun Rencana Regional menjelaskan hal itu pembangunan berkelanjutan membutuhkan keseimbangan tiga primer pilar yang: ekonomi, sosial dan lingkungan. Terkait dengan itu, pembangunan pariwisata berkelanjutan digambarkan sebagai pengembangan pariwisata untuk mendapatkan manfaat ekonomi tanpa lingkungan yang merusak, keseimbangan ekologi dan kebutuhan sosial. Rencana Jangka Menengah

Daerah Kota Bandung (RPJMD) 2009-2013 memberikan indikator pengembangan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan kota yang terkait konservasi lingkungan. Pemerintah daerah menyediakan program yang didirikan untuk mengoperasionalkan indikator pengembangan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan. Makalah ini meneliti sejauh mana berkelanjutan pengembangan pariwisata tercermin dalam praktik dan sikap pemerintah daerah di Kota Bandung.

2. Penelitian ini dilakukan oleh (Giovinde Annisa Hashrawi, Sugihartoyo, 2015). Paradigma pembangunan di banyak Negara kini lebih berorientasi pada pengembangan sektor pariwisata. Bagi Indonesia, saat ini sektor pariwisata menduduki peringkat ke lima sebagai penghasil devisa Negara. Dimana terdapat tiga destinasi unggulan tujuan wisata, yang salah satunya adalah Kota Batam, Kepulauan Riau. Dengan memanfaatkan lokasi yang strategis, pemerintah Kota Batam mulai menyusun konsep pengembangan pariwisata dengan membagi Kota Batam menjadi tiga cluster, pembagian ini di dasarkan kepada karakteristik dari masing – masing wilayah, Pulau Batam sebagai kawasan MICE, perbelanjaan dan rekreasi modern, Pulau Rempang hingga pulau galang sebagai kawasan Argowisata dan bahari dan kecamatan Belakang padang sebagai pariwisata seni dan budaya. Saat ini kegiatan pariwisata hanya terpaku pada saat sedang berlangsung nya acara event tahunan, dimana pada saat hari – hari biasa, hampir tidak ada ditemui wisatawan yang berkunjung ke Belakang Padang. Sebagai kawasan yang diperuntukan untuk pengembangan pariwisata seni dan

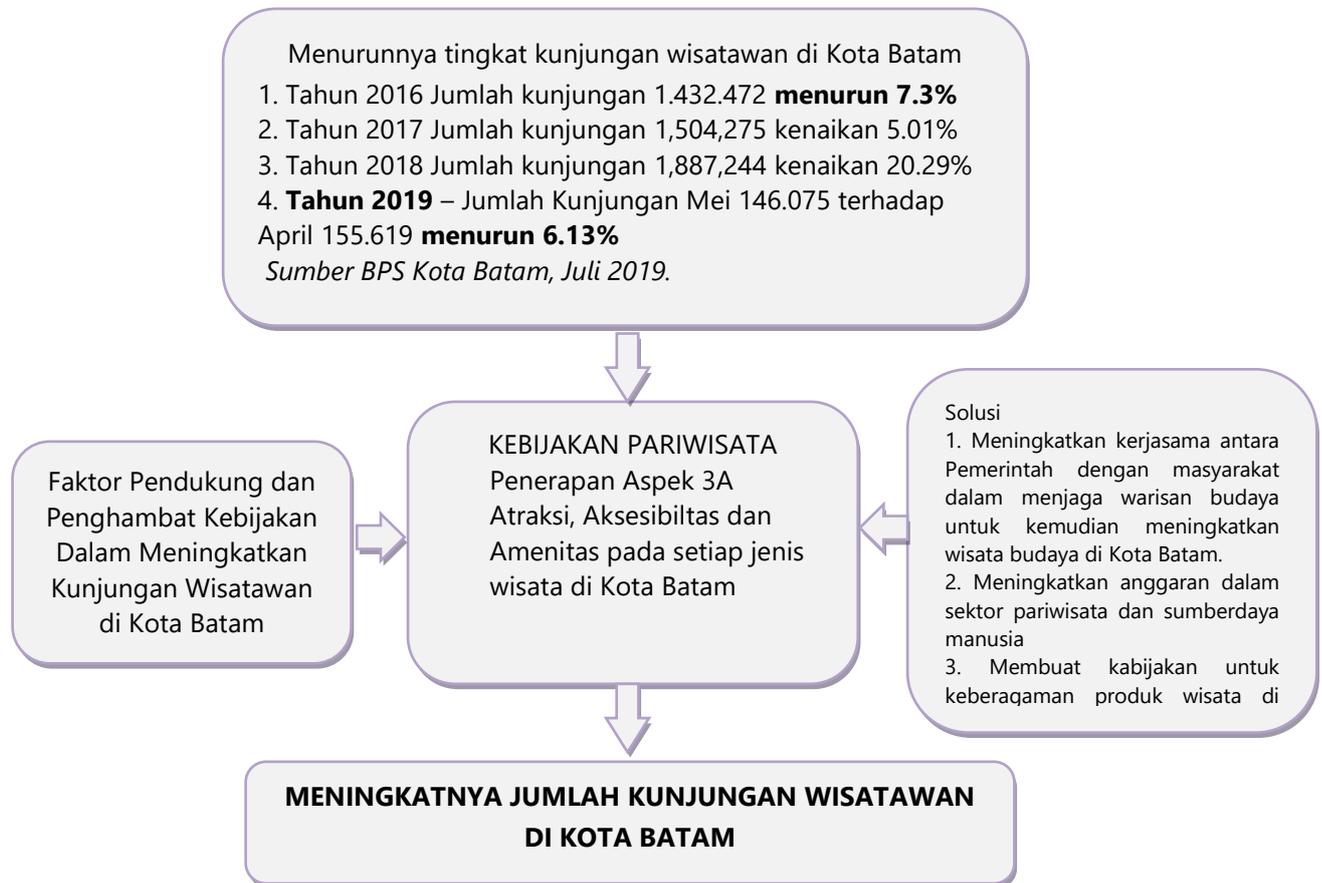
budaya, Belakang Padang perlu strategi – strategi yang tepat untuk dapat mempertahankan agar citra melayu tetap terjaga di Kota Batam, selain itu juga untuk dapat meningkatkan perkembangan pariwisata di Belakang Padang. Dalam mencari strategi – strategi yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis SWOT. Karena analisis SWOT merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk menyusun suatu strategi. Strategi diperoleh dengan cara menganalisis faktor internal dan eksternal untuk mengetahui Strength, Weakness, Opportunity dan Threat yang dimiliki oleh lokasi studi. Sehingga pada akhirnya akan didapatkan strategi pengembangan SO, ST, WT, WO yang diharapkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Jupir, 2013) yang meneliti implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian Jupir tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal, berdasarkan hasil penelitian tersebut, belum optimal karena faktor-faktor penunjangnya tidak disediakan dengan baik, mulai dari sumber daya pendukung hingga struktur birokrasi. Sejumlah hasil yang mengemuka dalam penelitian tersebut adalah implementasi menggunakan pendekatan *top down*, minimnya ruang partisipasi publik, promosi kurang memadai, dan kinerja pelaksana kebijakan yang kurang optimal.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Kencana, 2011) melakukan penelitian mengenai peranan sektor pariwisata dalam perekonomian Provinsi DKI

Jakarta. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis Input-Output tahun 2006. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan sektor pariwisata dalam perekonomian DKI Jakarta relatif besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata untuk struktur permintaan sebesar 15,23 persen dari total permintaan Provinsi DKI Jakarta, kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga sebesar 22,46 persen dari total konsumsi rumah tangga. Sektor pariwisata DKI Jakarta mempunyai kemampuan menarik yang lebih besar terhadap pertumbuhan output sektor hulunya dibandingkan dengan kemampuan sektor pariwisata untuk mendorong pertumbuhan sektor hilirnya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Maulida, 2009) melakukan penelitian mengenai Analisis Sektor Basis dan Potensi Daya Saing Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya Pasca Otonomi Daerah. Alat analisis yang digunakan adalah *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*, dan *Porter's Diamond*. Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan *Porter's Diamond* adalah faktor yang menjadi keunggulan pariwisata Kabupaten Tasikmalaya adalah sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kondisi permintaan domestik, peranan pemerintah, persaingan dan bisnis souvenir. Sedangkan kelemahannya adalah sumberdaya modal, infrastruktur industri pendukung dan terkait dan strategi pemasaran.

## 2.9 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan peran pemerintah Kota Batam melalui kebijakan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan peneliti akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pengembangan pariwisata. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka relevan jika peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mencari, menggali informasi dan mendeskripsikan mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Kota Batam dalam penerapan 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas).

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, ada yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah. (Sugiono, 2014: 207). Menurut Spradly dalam (Sugiono, 2014: 208) fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terikat dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Apabila tidak dibatasi maka penelitian tersebut tidak akan usai sebab data yang didapat dilapangan melebihi dari tujuan awal peneliti. Selain itu fokus

penelitian juga berfungsi sebagai pedoman sebuah penelitian sehingga penelitian tersebut sesuai dengan tujuan awal penelitian.

Moleong (2011:94) menjelaskan penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pariwisata dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batam yakni penerapan kebijakan konsep 3A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas, dan menjelaskan kebijakan pada setiap jenis wisata yang ada di Kota Batam.
2. Mendeskripsikan faktor penghambat serta faktor pendukung dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batam.

### **3.3 Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley (Sugiyono, 2014: 215), dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu (Sugiyono, 2014) :

1. Data primer, berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Dalam penelitian ini informan dipilih menggunakan teknik *purposive*

*sampling*. Berikut merupakan kriteria narasumber atau informan yang di pilih dalam penelitian ini :

- a. Informan benar-benar mengetahui permasalahan, serta terlibat langsung dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian ini dan biasanya ditandai oleh kemampuan penyampaian informasi secara spontan atau di luar kepala ketika menjawab suatu pertanyaan.
  - b. Informan masih berperan aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
  - c. Informan mempunyai integritas dan cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
2. Data sekunder, sumber data sekunder yang diperoleh dapat berupa dokumen (arsip), yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber arsip lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari data empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini dijelaskan Nasution (Sugiyono, 2016:222) meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
- a. Memasuki lokasi penelitian (*getting in*)
  - b. Berada dilokasi penelitian (*getting along*)
  - c. Pengumpulan data (*logging data*)

Ada tiga macam teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara mendalam, merupakan pertemuan langsung antara peneliti dan informan, untuk mendapat gambaran guna memperoleh

informasi yang dibutuhkan dan tidak dapat ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam serta pengusaha yang bergerak dibidang wisata dan masyarakat wisatawan di Kota Batam maupun dari pihak luar yang terkait dengan penelitian ini. Informan yang dijadikan narasumber adalah :

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	NAMA	JABATAN	ALASAN PEMILIHAN INFORMAN
1.	Drs. Ardiwinata	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	Mengetahui permasalahan terkait kebijakan pariwisata Kota Batam
2.	Nurlela, SE	KA. Seksi Objek & Daya Tarik Wisata	Mengetahui permasalahan terkait kebijakan pariwisata Kota Batam
3.	Eddy Sooetrisno	Ketua Batam Heritage Society	Mengetahui potensi wisata bahari dan oengembangannya
4.	Nurussaadah	<i>General Manager (GM) Hypermart Store Nagoya Hill</i>	Mengetahui keadaan Nagoya hill jika waktu liburan dan kenaikan jumlah pengunjung terlihat sangat signifikan menjelang akhir pekan.
5.	Chairani, AMD	Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	Mengetahui potensi wisata Kota Batam
6.	Muhammad Mansyur	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam	Mengetahui kontribusi Pemko Batam lewat pembangunan infrastruktur

2. Obsevasi, istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan

mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.

3. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen merupakan sumber data peneliti dalam bentuk tulisan, gambar, foto sebagai bahan tambahan untuk penelitian.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2014) menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data ini meliputi:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan potonya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan

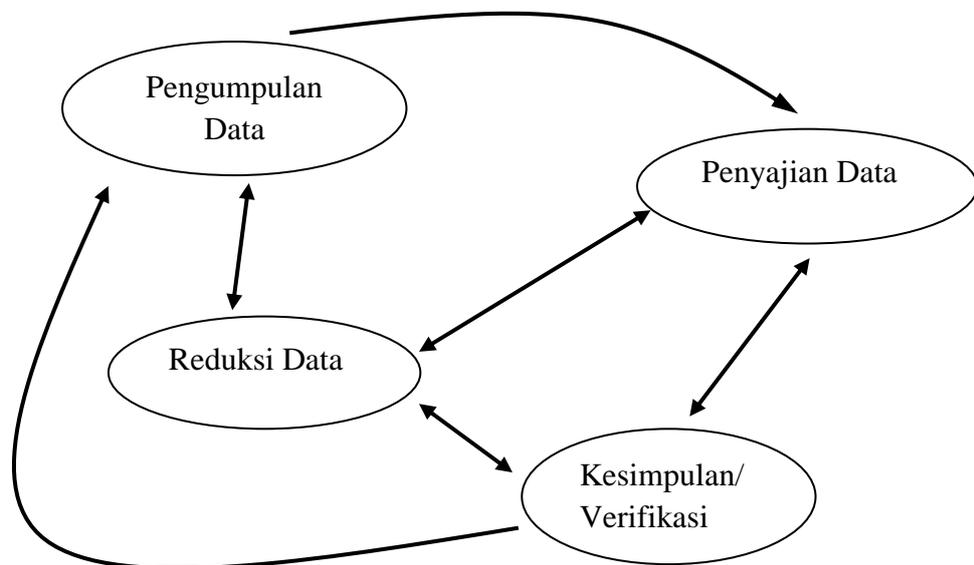
mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



**Gambar 3.1** Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

Sumber: Sugiyono, 2014:247

### **3.5 Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, untuk menjamin derajat kepercayaan atau kebenaran, maka peneliti memakai uji keabsahan data sbagai berikut (Sugiyono, 2014):

1. Uji Kredibilitas, kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dilakukan dengan:
  - a. Perpanjang Pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
  - b. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.
  - c. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
  - d. Mengadakan membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.
2. Uji Transferability, dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.
3. Uji depenability, melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
4. Uji konfirmability, hasil penelitian telah disepakati banyak orang.

### **3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.

## b. Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian sudah dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Agustus 2019. Tabel waktu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Waktu Penelitian**

Kegiatan	Bulan																			
	April 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Perencanaan																				
Studi Pustaka																				
Penyusunan Proposal																				
Pengumpulan data																				
Pengelolaan data																				
Analisis Data																				
Penyerahan laporan																				